



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **R. HENDRAWAN VIRANDIKA PRABOWO**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENGELUARAN**
3. NHK : **458627**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 465.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/105 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 462 m2 di KAB / KOTA KAYONG UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 120.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BYSON Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
5. MOBIL, NISSAN MARCH Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 21.136.006

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 621.136.006

**III. HUTANG****Rp. 190.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 431.136.006****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.